

I.B.b.01.9.3. b.2

15

✓ Harien Propitawat



MITRAGENDER

Kesetaraan, Keadilan & Kemitrasejajaran

TEMU NASIONAL

PRESTASI PEREMPUAN INDONESIA

Hotel RedTop Jakarta, 29 - 31 Juli 2007

Organized By :



Sekretariat Nasional :

Gedung Cik's, Lt. 4 Jl. Cikini Raya No. 84 - 86 Menteng, Jakarta Pusat

Telp. (021) 391 0793, (021) 319 27581, (021) 314 6667

Fax. (021) 319 27581, (021) 314 4784, (021) 314 4872

website : www.mitrager.org

email : mitragender_pusat@yahoo.or.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



TEMU NASIONAL

PRESTASI PEREMPUAN INDONESIA

LATAR BELAKANG :

Peran kaum perempuan dewasa ini diakui telah terjadi peningkatan dalam semua bidang kehidupan. Mulai dari peran politik, peran ekonomi, peran birokrasi, peran seni budaya, bahkan termasuk bidang-bidang yang selama ini selalu didominasi kaum laki-laki sekalipun. Prestasi tertinggi perempuan Indonesia di bidang politik adalah Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia, dan ini menjadi inspirasi bagi semua kaum perempuan Indonesia.

Kesiapan perempuan untuk maju secara berani mengambil inisiatif dalam segala kebijakan menyangkut hidupnya dan kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan. Penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara selayaknya menjadi konsensus para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal. Karenanya perempuan Indonesia tidak mungkin maju sendirian, sementara para perempuan yang lain masih tertinggal pengetahuannya dan terbelenggu oleh mitosnya sendiri.

Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Karena pada intinya perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran. Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan. Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan dan penindasan.

Keberhasilan perempuan tetap menjadi *key point* bagi operasionalisasi kerja secara menyeluruh, tidak saja dalam lingkup keluarga, rumah tangga, akan tetapi dalam lingkup negara dan bangsa. Dalam kaitan ini tentu sangat rasional kalau jumlah perempuan (secara kuantitas) menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung operasionalisasi pembangunan (tentu tetap harus dikaitkan dengan kualitas dan atau minimal proporsional antara kuantitas dan kualitasnya).

Walaupun demikian, bukan berarti pembebasan yang *kebablasan* tanpa mengikuti budaya Indonesia. Kebebasan tersebut dimaksud, bukanlah kebebasan pergaulan yang seperti kita lihat saat ini, tetapi kebebasan yang masih dibatasi oleh norma agama dan adat ketimuran yang santun dan mengutamakan kebaikan bagi komunitas masyarakatnya.

TARGET KEGIATAN :

1. Akhirnya forum prestasi perempuan Indonesia.
2. Sosialisasi berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan dan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Terbangunnya kesadaran (etos) prestasi perempuan Indonesia untuk membangun harga diri dan kepercayaan pergerakan kaum perempuan dalam membangun bangsa dan negara.
4. Terbangunnya database dan dokumentasi prestasi perempuan Indonesia.
5. Akhirnya kretavitas dan insiatif perempuan Indonesia.

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



TEMU NASIONAL

PRESTASI PEREMPUAN INDONESIA

NAMA & TEMA KEGIATAN :

Nama : **Temu Nasional Prestasi Perempuan Indonesia**
 Tema : **"Merangkai Prestasi Perempuan Indonesia untuk Kemajuan & Kesejahteraan Bangsa"**

© HAK CIPTA MILIK IPB (Institut Pertanian Bogor) BENTUK KEGIATAN :

1. Studi Kebijakan
2. Talkshow Prestasi
3. Mitragender Expo
4. Kreativitas Seni
5. Kompetisi Media
6. Fashion Show

WAKTU & TEMPAT :

Waktu : **Minggu - Selasa, 29 - 31 Juli 2007**
 Tempat : **Hotel RedTop
 Jl. Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat
 Telp. 021-3500077, Fax. 021-3504852**

SARAN PESERTA :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. DPRD
4. TP PKK
5. Dharma Wanita
6. KOWANI/ BKOW/ GOW
7. IWAPI
8. BUMN
9. Kampus & Pusat Studi Wanita
10. Ormas & LSM Perempuan Lainnya

MATERI KEGIATAN :

1. **Pembukaan :**
 - Pidato Peresmian Oleh Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla/ Wakil Ketua Badan Pembina Mitragender
 - Launching Website Mitragender
 - Perencanaan Penandatanganan MOU Mitragender dengan beberapa Kementerian & LSM
2. **Studi Kebijakan :**
 - **Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI** : Evaluasi Pencapaian Prestasi Perempuan Indonesia
 - **Menteri Pendidikan Nasional RI** : Pencapaian Prestasi Perempuan di Bidang Pendidikan
 - **Menteri Kesehatan RI** : Pencapaian Prestasi Perempuan di Bidang Kesehatan

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



TEMU NASIONAL

PRESTASI PEREMPUAN INDONESIA

Talkshow :

- Talkshow Prestasi Politik
- Talkshow Prestasi Pendidikan
- Talkshow Prestasi Dunia Usaha
- Talkshow Prestasi Birokrasi
- Talkshow Sosial Budaya

Litragender Expo :

- Female Radio
- Majalah Kartini
- Tabloid Nova
- Ristra
- Mustika Ratu
- Sari Ayu
- Safira House
- Dani Dahlan
- Ane Afante
- Klinik Pasutri
- RS Kanker Darmais
- RS Jantung Harapan Kita
- RS Ibu & Anak Harapan Kita
- Unilever
- Holistik
- Hembing
- Sofie Martin
- Amway
- Tupperware,

Kreativitas Seni :

- Pelawak
- Penyanyi & Musisi
- Sastrawan
- Artis
- Designer/Peragawati.

Publikasi Media :

- Buku
- CD
- Website
- Dorce Show
- TVRI

PENYELENGGARA :
PENYELENGGARA :

MITRAGENDER (Masyarakat Peduli Kesetaraan & Keadilan Gender)

didukung oleh

Departemen Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



TEMU NASIONAL PRESTASI PEREMPUAN INDONESIA

AGENDA ACARA :

Hari Pertama : Minggu, 29 Juli 2007

Pukul 09.00 – 10.00 Pembukaan Mitragender Expo & Lomba Pidato Prestasi Perempuan antar Siswa SLTA Perempuan se DKI Jaya

Pukul 12.00 – 18.00 Registrasi Peserta Temu Nasional Prestasi Perempuan Indonesia

Pukul 19.00 – 21.00 Pembukaan & Ramah Tamah :

1. Pidato Peresmian Oleh Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla/ Wakil Ketua Badan Pembina Mitragender
2. Launching Website Mitragender
3. Perencanaan Penandatanganan MOU Mitragender dengan beberapa Kementerian & LSM

Kedua : Senin, 30 Juli 2007

Pukul 08.00 – 10.00 Studi Kebijakan :

Narasumber 1 : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI : Evaluasi Pencapaian Prestasi Perempuan Indonesia

Narasumber 2 : Ace Suryadi, P.hD/ Dirjen Pendidikan Non Formal & Informal Depdiknas RI :

Pencapaian Prestasi Perempuan di Bidang Pendidikan

Narasumber 3 : Dr. Sri Astuti S. Soeparmanto, M.Sc, PH/ Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI :

Pencapaian Prestasi Perempuan di Bidang Kesehatan

Narasumber 4 : Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec, Ph.d/ Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos :

Kesetaraan & Keadilan Gender dalam Pengembangan Program Keluarga Harapan

Moderator : Nurul Arifin/Aktifis Pemberdayaan Perempuan

Pukul 10.00 – 12.00 Talkshow Prestasi Politik Perempuan Indonesia :

Narasumber 1 : Hj. Ratu Atut Chosiyah/Gubernur Banten

Narasumber 2 : Dra. Rustriningsih, M.Si/Bupati Kebumen

Narasumber 3 : Hj. Tutty Hayati Anwar, SH, M.Si/Bupati Majalengka

Moderator : Ruhut Sitompul, SH/Pengacara & Artis

Pukul 13.00 – 15.00 Talkshow Prestasi Pendidikan Perempuan Indonesia :

Narasumber 1 : Prof. Dr. Kemala Motik/Rektor Universitas IEU

Narasumber 2 : Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc/ Pakar Gender IPB

Narasumber 3 : Dr. Pratiwi Sudarmono/Ilmuan

Narasumber 4 : Sri Rosiati & Sri Irlaningsih/ Guru Sekolah Darurat Kartini

Moderator : Angelina Sondakh/Anggota DPR RI

Pukul 19.00 – 21.00 Fashion Show Busana Perempuan Indonesia Mutakhir

Ketiga : Selasa, 31 Juli 2007

Pukul 08.00 – 10.00 Talkshow Prestasi Birokrasi Perempuan Indonesia :

Narasumber 1 : Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. /Sekjen DPD

Narasumber 2 : Diah Anggraeni, SH, MM /Sekjen Depdagri

Narasumber 3 : Dr. Nina Sardjunani/Deputi Meneg Bappenas

Moderator : Rae Sita Supit/Artis & Penggiat Perempuan

Pukul 10.30 – 12.30 Talkshow Prestasi Sosial Budaya Perempuan Indonesia :

Narasumber 1 : Rita Subowo /Ketua KONI Pusat

Narasumber 2 : Kemala Chandrakirana/Komnas Perempuan.

Narasumber 3 : Baby Jim Aditya/Aktifis LSM Anti Narkoba

Moderator : Dian Khrisna/ Presenter Metro TV & Mantan Putri Indonesia

Pukul 13.30 – 15.30 Talkshow Prestasi Dunia Usaha Perempuan Indonesia :

Narasumber 1 : Siti Hartati Murdaya/Pengusaha Nasional

Narasumber 2 : Tuti Pudjiastuti/Pengusaha Nasional

Narasumber 3 : Eka Sari Lorena/Presdir Lorena Air

Moderator : Adjie Massaid/Anggota DPR RI

Pukul 16.00 – 17.00 Penutupan & Endnote Speech :

Dr. H.R. Agung Laksono/Ketua DPR RI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



TEMU NASIONAL PRESTASI PEREMPUAN INDONESIA

SUSUNAN PANITIA :

A. Penanggung Jawab :

- Sri Redjeki Sumaryoto, SH (Ketua Presidium Nasional)

B. Panitia Pengarah :

- Yusuf Supiandi, Drs., MA (Ketua)
- Marlina Kasri, SH, M.Si. (Sekretaris)
- M. Idris Ismet Abdullah, SE, MM (Anggota)
- A. Oka MAhendra, SH (Anggota)
- M. Idris Vitayala, Dr., Ir. (Anggota)
- M. Idris Edarmayanti, Prof, Dr, MPD, APU (Anggota)
- M. Idris M. F. Moeloek, Dr, dr (Anggota)
- M. Idris Abdul Aziz Hoesein, M, Eng (Anggota)
- M. Idris Wahmat Santika, dr. (Anggota)
- M. Idris M. N. Anie Amaluddin, SH, M.Si (Anggota)
- M. Idris Sunarijah R.M. Kartasasmita, Ph.D. (Anggota)

C. Panitia Pelaksana

- Ketua : Drs. Ibnudin Iddat, M.Si
- Wakil Ketua : Arief Budiman, SE
- Sekretaris : Febry Yanti, S.Kom
- Wakil Sekretaris : Dani Rahmadani, SE
- Bendahara : Drs. J. Amril
- Wakil Bendahara : Fitri, Amd

Koordinator-Koordinator Pelaksana

- Bidang Kehumasan : Robbiatul Adawiah, S.Ag
- Bidang Kesekretariatan : Abdul Choir
- Bidang Kepesertaan : Sebrina
- Bidang Narasumber : Niya Febriana, S.Kom
- Bidang Operasional : Irsal Sadek
- Bidang Expo : Erwin Setiadi
- Bidang Dokumentasi : Dwi Andika Nugraha
- Bidang Perizinan & Acara : Dhani Anggara
- Bidang Umum : Ahmad Djaelani

D. Sekretariat Panitia

Bojonegara, Gedung Ciks, Lt. 4 Jl. Cikini Raya No. 84 - 86 Menteng, Jakarta Pusat
 Telp. (021) 391 0793, (021) 319 27 581, (021) 3146667.
 Faksimili (021) 31927581, (021) 3144784, (021) 3144877

PELUTUP : PENUTUP :

Demikian ajuan ini disampaikan, agar dapat menjadi pertimbangan semua pihak untuk bersama-sama mewujudkannya.



Pentingnya Prestasi Pendidikan Perempuan Indonesia Menyongsong Era Globalisasi

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Oleh :

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PENTINGNYA PRESTASI PENDIDIKAN PEREMPUAN INDONESIA MENYONGSONG ERA GLOBALISASI

OLeh:

**Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.
Staf Pengajar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor**

**Disampaikan Pada:
TEMU NASIONAL
Prestasi Perempuan Indonesia
Hotel RedTop Jakarta
30 Juli 2007**

**MITRA GENDER
KESETARAAN, KEADILAN & KEMITRASEJAJARAN
JAKARTA
2007**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti dikeluarkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Desain Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia tercermin dari Visi dan Misionya. VISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk mencapai: (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan VISI Pembangunan Nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yang meliputi: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera. ^{1) 2)}

Secara khusus, PUG di Bidang Pendidikan diwujudkan dalam kebijakan "Pendidikan Untuk Semua atau PUS (*Education for All*)", yang di dalamnya mencanangkan beberapa hal penting berkenaan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan, diantaranya menghapus kesenjangan atau disparitas gender di Pendidikan Dasar dan Menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam Pendidikan Dasar yang berkualitas baik. Menindaklanjuti kesepakatan Dakar dan merespon Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) "Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan" di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Di dalam rangka melaksanakan RAN-PUG di Bidang Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DJS) perlu mencanangkan Program Pendidikan Perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di Bidang Pendidikan.

Seiring dengan era globalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*. Target MDGs sampai dengan tahun 2015, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan pendidikan dasar, (3)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

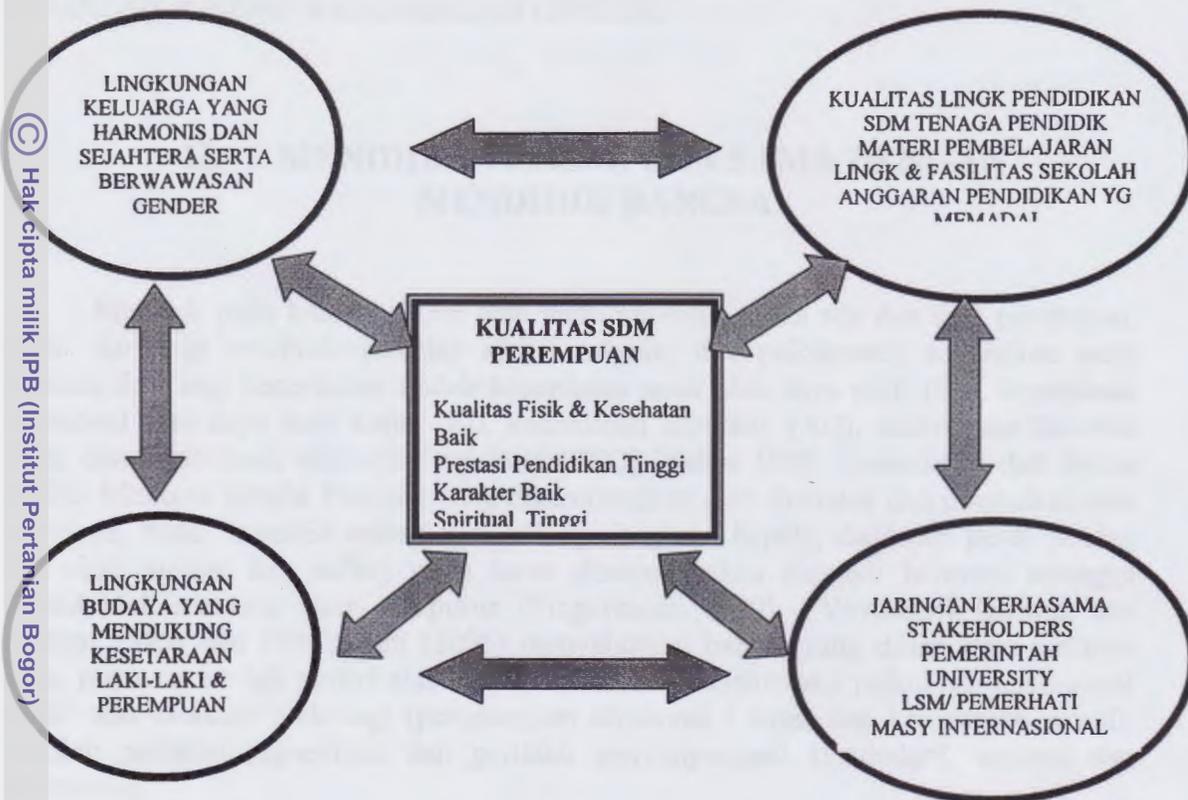
Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Kembali lagi kepada aspek pendidikan yaitu bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan jaminan undang-undang mempunyai akses terhadap pendidikan dan mendapatkan manfaat dari pelayanan-pelayanan semua jenjang pendidikan dalam rangka menguasai IPTEK. Berdasarkan data statistik, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Depdiknas maupun hasil studi dan pengamatan sistem pendidikan nasional, memperlihatkan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan yang semakin mengecil dari waktu ke waktu. Data BPS Tahun ajaran 2004/2005 menunjukkan proporsi siswa/mahasiswa yang cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan tingkat kesenjangan yang relatif rendah (Jenjang TK: L=50%, P=50%; Jenjang SD+MI: L=52%, P=48%; Jenjang SMP+MTs: L=50%, P=50%; Jenjang SM+MA: L=52%, P=48%; Jenjang PT+PTAI+PTK: L=51%, P=49%).

Namun demikian, seandainya dikaji dengan lebih dalam, masih ada kesenjangan gender yang cukup berarti dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu masih ada segregasi gender dalam pemilihan jurusan, yang banyak dipengaruhi oleh stereotipe gender. ^{2) 3)} Perbaikan dan investasi di bidang pendidikan bagi perempuan bukan saja akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (lebih dari separuh sumberdaya manusia adalah perempuan), akan tetapi juga merupakan kunci bagi mencapai pembangunan bidang-bidang lainnya (antara lain kesehatan, gizi, ekonomi, politik), serta pembangunan berkelanjutan pada umumnya, karena "Ibu yang Cerdas Akan Mencerdaskan Bangsaanya".

Dengan demikian, jelaslah sudah betapa pentingnya prestasi perempuan Indonesia di era globalisasi dan betapa pentingnya pemberdayaan perempuan di segala bidang pembangunan. Peran kaum perempuan Indonesia di semua bidang kehidupan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, mulai dari peran politik, peran ekonomi, peran birokrasi, peran seni budaya, dan peran pendidikan. Oleh karena itu kesiapan perempuan untuk maju mengambil setiap kesempatan yang diberikan berdasarkan jaminan undang-undang harus segera diartikulasikan dan dikokohkan. Tuntutan kepada setiap perempuan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi dan menjadi suatu keharusan, apalagi mengingat tuntutan di Era Globalisasi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pendidikan kaum perempuan (ditinjau dari konsep kualitas sumberdaya manusia dan pendekatan teori investasi manusia), kondisi prestasi pendidikan perempuan di Indonesia, dan pentingnya mengetahui gender checklist di bidang pendidikan (baik *checklist* kesetaraan gender bidang pendidikan di tingkat keluarga dan masyarakat, *checklist* kesetaraan gender di bidang pendidikan, dan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 1. Lingkungan yang Berpengaruh pada Kualitas SDM dan Prestasi Pendidikan Perempuan.

Gambar di atas memberikan gambaran bahwa lingkungan ekologi berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia (SDM) perempuan yang diantaranya terwujud dalam prestasi pendidikannya. Lingkungan awal yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga intinya (*nuclear family*) dan keluarga besarnya (*extended family*) serta lingkungan budaya tempat dia dibesarkan. Lingkungan budaya inilah yang melandasi keluarga dan masyarakat untuk membentuk identitas dan jati diri seorang perempuan yang secara simultan membentuk kualitas SDM perempuan. Kualitas pendidikan formal yang terdiri atas sistem pendidikan dan gapembelajaran dari para pendidik membentuk sikap kerja dan cara berpikir yang sistematis yang akhirnya menghasilkan prestasi di bidang pendidikan bagi kaum perempuan. Hal yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kualitas SDM perempuan adalah perjuangan yang tak henti-hentinya dari

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

para stakeholder (yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, universitas, dan LSM) dalam memberikan jaminan hukum dan penyusunan kebijakan yang responsif gender dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perempuan. Forum “TEMU NASIONAL” seperti ini adalah forum yang sangat tepat untuk menyusun rencana dan strategi dalam berkontribusi terhadap permasalahan bangsa dalam mewujudkan “KESETARAAN, KEADILAN & KEMITRASEJAJARAN GENDER”.

II. MENDIDIK PEREMPUAN SAMA DENGAN MENDIDIK BANGSA

Merujuk pada kualitas SDM atau mutu manusia, maka ada dua segi pandangan, yaitu dari segi pendidikan adalah afeksi, kognisi, dan psikomotor, sedangkan mutu manusia dari segi kecerdasan adalah kecerdasan nalar atau daya pikir (IQ), kecerdasan emosional atau daya hati/ kalbu (EI), kecerdasan adversity (AQ), kecerdasan finansial (FI), dan kecerdasan emosional-spiritual (ESQ) (Salim 1996; Soesarsono dan Sarma 2002). Menurut filsafat Platonik yang dikembangkan oleh Socrates dan diteruskan oleh muridnya, Plato, manusia terbagi menjadi tiga bagian : kepala, dada dan perut (simbol dari akal, ambisi dan nafsu) yang harus diseimbangkan menjadi harmoni sehingga terbentuklah manusia yang sempurna (Megawangi, 1999). Voydanoff (Bowen dan Pisman 1995) dan Puspitawati (2006) menyebutkan bahwa yang dinamakan *outcome* suatu manusia adalah terdiri atas kesehatan fisik, kesejahteraan psikologi psiko-sosial terdiri atas keadaan psikologi (penghargaan diriemosi / stres, dan kecerdasan emosi), masalah perilaku (agresifitas dan perilaku penyimpangan/ kenakalan), aspirasi dan prestasinya.

Kualitas SDM perempuan berarti secara fisik, mental, psikologis dan talenta adalah dalam kondisi yang sangat baik. Apabila prestasi pendidikan perempuan dalam kualitas yang baik, maka produktivitas perempuan di dalam bidang ekonomi dapat ditingkatkan sehingga perempuan mampu memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya secara lebih mandiri serta mampu menyejahterakan kehidupan secara optimal.

Kualitas perempuan sebagai ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak-anaknya. Perempuan juga sangat dominan dalam mewujudkan Keluarga yang Berkualitas melalui fungsi pemeliharaan dan pengasuhan atau “*caring ang parenting*”. Perempuan yang mempunyai prestasi pendidikan yang tinggi ditambah dengan kontribusi yang baik, maka akan berpengaruh pada kualitas pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Melalui pengasuhan yang baik, anak akan merasa lebih percaya diri, anak merasa dilindungi dan akhirnya mengakibatkan tumbuh kembang anak yang baik pula, yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan anak dikatakan bahwa 5 tahun pertama merupakan masa yang sangat kritis bagi anak untuk membentuk kematangan fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, memasuki usia sekolah sampai dengan

umur 12 tahun, anak mengalami proses kematangan sosial, mental, psikologis dan moral (Harris & Liebert, 1992; Santrock, 1997).

Berkaitan dengan kualitas SDM di atas, ada pembenaran tentang pandangan Gary S Becker (1975) bahwa investasi di bidang pendidikan diharuskan untuk dilaksanakan karena telah memberikan keuntungan secara makro dan jangka panjang berupa keuntungan yang tidak hanya didapat dari pemuda yang berpendidikan sebagai hasil dari investasi yang ditanamkan saja (*private rate of returns*), namun juga keuntungan yang dikikmati oleh masyarakat di lingkungan sekitar (*social rate of returns*). Pendekatan "*Rate-of-Return*" ini adalah pendekatan yang disebut *cost-benefit* yang mempunyai prinsip rasional yaitu prinsip yang mengutamakan hasil yang melebihi biaya yang dikeluarkan meskipun membutuhkan waktu menunggu sampai periode tertentu.

Berkaitan dengan prestasi pendidikan anak yang merupakan salah satu kualitas SDM, maka dalam teori keluarga disebutkan bahwa peran keluarga (*family roles*) merupakan sumber institusi paling awal dan paling kuat dalam mensosialisasikan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan norma masyarakat yang dianut. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada outcome anak (Simons 1996). Hasil temuan yang lebih spesifik menyatakan bahwa kontribusi peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu (*mother's parenting roles*) mempunyai keistimewaan yang lebih besar dibandingkan dengan peran pengasuhan yang dilakukan oleh ayah (*father's parenting roles*) (Conger dan Elder 1994; Puspitawati, 2006).⁸⁾ Sebertinya lingkungan keluarga yang dimotori oleh peran ibu sebagai agen utama dan pertama bagi pendidikan dan sosialisai bagi anak-anaknya akan menghasilkan prestasi akademik yang tinggi.

Meskipun ditemukan hasil adanya peran ibu yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan peran ayah dalam meningkatkan prestasi akademik anak dan mencegah perilaku kenakalan pelajar, namun berdasarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang sudah menjadi kebijakan negara (dalam hal ini dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), maka perlu ada kesetaraan pula dalam hal pengasuhan anak di dalam keluarga. Melalui kerjasama yang baik dan erat antara ayah dan ibu dalam pengasuhan remaja, maka akan memberikan *role model* yang saling melengkapi (komplementer) bagi remaja. Ciri-ciri yang khas dalam hal pengasuhan, pendekatan individual, cara berkomunikasi dan pendekatan interpersonal antara ayah dan ibu serta remaja memberikan variasi bonding dan interaksi triadik yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila interaksi antar anggota ini berjalan dengan baik sehingga tercapai kestabilan lingkungan keluarga, maka remaja akan berpeluang besar dalam meningkatkan prestasi akademiknya dan terhindar dari perilaku kenakalan.

Tantangan mengenai prestasi pendidikan perempuan dalam menyongsong era globalisasi adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Ukuran kinerja: *Human Development Index* (HDI) Indonesia

2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta mempersempit kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, kontrol, partisipasi, serta penerimaan manfaat dalam pembangunan.

Ukuran Kinerja:

1. *Gender-related Development Index (GDI) Indonesia*
2. *Gender Empowerment Measurement (GEM) Indonesia*

Dengan demikian, secara garis besar ada beberapa alasan penting, mengenai makna kalimat “**Mendidik Perempuan sama dengan Mendidik Bangsa**”, yaitu:

1. Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga, yaitu terkendalinya pertumbuhan penduduk.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah angka fertilitas total penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah jumlah rata-rata anak yang pernah dilahirkan perempuan usia 40-49 tahun.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan menikah, semakin tinggi permintaan terhadap alat/obat kontrasepsi (KB).

Kesimpulan:

Dengan semakin tingginya taraf pendidikan perempuan, mereka akan cenderung menikah dalam usia yang relatif lebih dewasa. Di samping itu, mereka cenderung menggunakan alat/obat kontrasepsi untuk memperpanjang jarak kelahiran anak dan dengan sendirinya membatasi jumlah anak yang pernah dilahirkan. Mereka juga cenderung bekerja di luar rumah (pendapatan yang memadai dan exposure to media/informasi lebih luas)⁹.

2. Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita.

- Sebagai dampak dari semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama, maka relatif semakin rendah resiko kehamilan dan kematian bayi atau kematian ibu melahirkan.
- Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin tinggi persentase anak yang diimunisasi (data internasional).
- Secara umum, semakin tinggi pendidikan (lama sekolah) penduduk, semakin tinggi umur harapan hidup (data provinsi).
- Semakin tinggi pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas (laki-laki dan perempuan), semakin rendah angka kematian bayi (data provinsi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Kesimpulan:

Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan kesehatan dan gizi yang lebih baik, termasuk untuk merawat anak⁹⁾.

3. Secara umum (laki-laki dan perempuan) terdapat korelasi positif dan signifikan antara tingkat ekonomi (pengeluaran per kapita) dengan tingkat kesehatan dan tingkat pengetahuan (melek aksara) serta pendidikan.

- Permasalahan penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah faktor kemiskinan (34%).
- Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin tinggi persentase penduduk yang melek aksara.
- Kesenjangan angka melek aksara antara perempuan dari kelompok pengeluaran tinggi dan pengeluaran rendah lebih besar dari pada kesenjangan yang sama pada penduduk laki-laki. Hal ini menandakan bahwa pengaruh tingkat ekonomi kepada rendahnya tingkat pengetahuan (melek aksara) lebih besar terjadi pada penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki.
- Permasalahan utama penduduk (laki-laki dan perempuan) usia 7-18 tahun tidak melanjutkan sekolah adalah masalah kemampuan untuk membiayai.

Kesimpulan:

Semakin meningkatnya pendapatan/ekonomi penduduk (laki-laki dan perempuan), maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan⁹⁾.

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sangat tergantung pada faktor manusia dan sumber daya alam di sekitarnya serta hubungan antara keduanya. Secara garis besar, manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam, agar nilai tambah dari sumberdaya alam itu akan memungkinkan peningkatan penyediaan pangan bagi konsumsi manusia dan akhirnya dapat mewujudkan kualitas hidup yang berkelanjutan. Untuk itu prestasi baik laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Dengan demikian, dari segi kebijakan makro disarankan agar kinerja pembangunan dapat bersifat responsif gender.

III. KONDISI PENDIDIKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Berbagai data dan informasi menunjukkan hal-hal yang cukup mengembirakan mengenai prestasi perempuan di bidang pendidikan. Meskipun masih ditemui adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan, namun kondisi pendidikan perempuan di Indonesia sudah menghasilkan prestasi yang patut untuk dihargai. Data dan informasi kondisi pendidikan perempuan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Mugniesyah, dkk (2003) di 9(sembilan) Perguruan Tinggi di Jawa Barat, maka diketahui bahwa secara umum domain laki-laki adalah pada kelompok fakultas eksakta, sedangkan perempuan pada kelompok fakultas non-eksakta. Disamping itu laki-laki secara umum lebih mendominasi pendidikan pasca sarjana dibandingkan dengan perempuan. Data mahasiswa (S-0, S-1, S-2, dan S-3) dari 9 Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa 54,8% adalah laki-laki dan 48.2% adalah perempuan, dengan komposisi proporsi perempuan lebih banyak dari laki-laki pada jenjang S-0; tetapi proporsi laki-laki lebih banyak dari perempuan pada jenjang S-1, dan selanjutnya semakin meningkat kesenjangan laki-laki dibandingkan perempuan pada S-2 dan S-3. Kesenjangan gender tertinggi terdapat pada Institut Teknologi Bandung (L>P), sedangkan di UPI proporsi perempuan (56.9%) lebih tinggi dari laki-laki (43.1%). Mahasiswa Program S-3 dari 26 Program Studi dari 4 Perguruan Tinggi di Jawa Barat didapatkan bahwa bahwa baik program studi yang bersifat eksakta maupun non-eksakta didominasi oleh laki-laki (69,6% dan 65,6%), dan sebagian kecil oleh perempuan (30,4% dan 34,4%).¹³⁾
2. Data Olimpiade Keilmuan baik di Tingkat Nasional maupun Internasional didominasi oleh siswa laki-laki. Prestasi Siswa perempuan masih dalam kuantitas yang minimal.
3. Jumlah tenaga dosen laki-laki lebih besar daripada dosen perempuan dengan proporsi Tingkat/ Golongan IV yang lebih banyak pula pada dosen laki-laki dibandingkan dengan dosen perempuan. Begitu pula dengan proporsi karyawan/ tenaga administrasi yang lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan (Data Kopertis Wilayah IV, Juni 2004) (BPS, 2004).
4. Proporsi kepala sekolah (Headmasters/ Principals) untuk Jenjang sekolah SMP (junior) dan SM (senior) masih menunjukkan kesenjangan gender dengan kondisi proporsi kepala sekolah laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (SMP: L= 87%, P= 13%; SM: L=90%, P=10%).
5. Jumlah lulusan Perguruan Tinggi (Negeri maupun Swasta) di 30 Propinsi di Indonesia pada tahun 2003/2004 menunjukkan proporsi yang seimbang antara laki-laki (50,41%) dan perempuan (49,59%) (BPS, 2004).

IV. GENDER *CHECKLIST* DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

Bab ini merupakan suatu ajakan secara bersama-sama untuk meningkatkan prestasi pendidikan perempuan Indonesia dalam menyongsong era globalisasi. Ada beberapa *checklist* yang harus diperhatikan baik oleh pihak keluarga dan masyarakat, maupun oleh pihak pemerintah.

4. *Checklist* Kesetaraan Gender Di Tingkat Keluarga dan Masyarakat ¹⁵⁾

1. Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan (sesuai dengan Motto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik Indonesia).
2. Nilai ekonomi anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan,
3. Mendidik anak baik laki-laki maupun perempuan harus berdasarkan asas keadilan gender dalam rangka memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani
4. Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, komunikasi terbuka dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan menghargai.
5. Meluangkan waktu bersama; memiliki waktu luang bersama dan melakukan aktivitas bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan mempunyai ikatan kuat antar anggota keluarga.
6. Pembagian peran yang jelas dan adil antar anggota keluarga; siapa yang bertanggung jawab melaksanakan peran instrumental (penyediaan sumberdaya dan kebutuhan anggota keluarga) dan peran afektif (pengasuhan, dukungan), serta komitmen/tanggung jawab yang baik terhadap peran tersebut.
7. Menjunjung tinggi prinsip harmonis dalam keluarga; menghindari konflik atau pertengkaran suami-istri terutama didepan anak-anak; saling menahan diri untuk tidak membentak/memaki saat terjadi konflik.
8. Anak perempuan boleh memilih bidang eksakta sejak sekolah menengah sampai ke Perguruan Tinggi (contohnya SMK-TI, SMK-Informatika, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, dll),
9. Anak perempuan boleh sekolah jauh dari rumahnya tanpa mengkuatirkan “keselamatannya sebagai perempuan”,
10. Harus ada perubahan pandangan bahwa “Anak perempuan yang sekolah tinggi masih tetap ‘laku’ untuk mendapatkan suami”,
11. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan masih punya potensi besar disarankan untuk melanjutkan kuliah ke pasca sarjana walaupun telah berkeluarga,

12. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan sudah berkeluarga disarankan untuk tetap berkarya (menjadi *home-based worker*), dan tidak melupakan hasil jerih payah kuliahnya,
13. Pengasuhan anak perempuan berperspektif gender:
 - a. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin)
 - b. Cari pendekatan yg tepat pada anak perempuan, awas *moodnya*
 - c. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian
 - d. Beri sosialisasi tentang sifat laki-laki dan cara respek dan menghargai laki-laki.
 - e. Ayah mensosialisasikan apa yang diharapkan laki-laki terhadap perempuan.
 - f. Ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi arahan dan nasehat pada laki-laki.
 - g. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
 - h. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
 - i. Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu eksakta.
 - j. Beri cara kemandirian yang cocok untuk perempuan.
 - k. Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan *sense of dangerous* untuk keperluan "survival".
14. Pengasuhan anak laki-laki berperspektif gender:
 - a. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin)
 - b. Cari pendekatan yg tepat pada anak laki-laki, awas *selebornya*.
 - c. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian.
 - d. Beri sosialisasi tentang sifat perempuan dan cara respek dan menghargai perempuan.
 - e. Ibu mensosialisasikan apa yang diharapkan perempuan terhadap laki-laki.
 - f. Ayah mensosialisasi bagaimana seorang laki-laki memberi perlindungan dan nasehat pada perempuan.
 - g. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
 - h. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
 - i. Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan.
 - j. Beri cara kemandirian yang cocok untuk laki-laki.
 - k. Anak laki-laki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan "survival".

B. Checklist Kebijakan Kesetaraan Gender di Bidang Pendidikan ^{5) 14)}

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender

- a. Meningkatkan jejaring kerja pengarusutamaan gender antar sektor di tingkat kabupaten dan provinsi.
- b. Penyelenggaraan forum komunikasi yang memberi kesempatan bagi pelaku pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaiknya dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- c. Menjalin kerjasama dengan LSM, PSW dan organisasi perempuan/peduli pendidikan untuk memberikan fasilitas kepada keluarga/orang tua yang kurang mampu untuk memberikan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan.
- d. Mengintensifkan penggunaan sistem informasi dan pendataan pendidikan terpilah jenis kelamin dan melakukan analisis terhadap data tersebut terutama untuk mengetahui kinerja dan perencanaan pendidikan yang berwawasan gender di tingkat provinsi, kabupaten/kota guna prumusan kebijakan dan program pendidikan yang berwawasan gender.
- e. Pengembangan instrumen perencanaan pendidikan setara dan adil gender.
- f. Pengembangan pesan-pesan standar tentang pendidikan setara dan adil gender.
- g. Mengembangkan pusat-pusat studi wanita baru atau memperluas cakupan pusat-pusat studi yang telah ada di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan berwawasan gender di bidang pendidikan.
- h. Meningkatkan peran pusat-pusat studi yang telah ada untuk melakukan berbagai studi masalah gender di bidang pendidikan.
- i. Mengembangkan program studi gender dalam pembangunan pada jenjang sarjana, magister dan dokter pada perguruan tinggi yang memiliki pusat studi wanita sebagai penyedia sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan gender dalam pembangunan yang kelak dapat menjadi peneliti, pengambil kebijakan, perencana dan pelaksana program pembangunan yang berwawasan gender.
- j. Melakukan analisis kebijakan yang masih bias gender baik peraturan perundangan, kurikulum maupun bahan ajar.
- k. Melakukan berbagai studi mengenai praktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pendidikan yang tidak responsif gender dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diusulkan.
- l. Menyempurnakan peraturan perundangan, kurikulum dan bahan ajar yang masih bias gender.
- m. Monitoring terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan gender di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- n. Evaluasi terhadap praktik-praktik yang dilaksanakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikannya.

3. Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender ¹⁾

- a. Mengembangkan strategi pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan.
- b. Melaksanakan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin.
- c. Mensosialisasikan gender mainstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Membangun komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang responsif gender.
- e. Mewujudkan adanya website dan jaringan internet bidang pendidikan di setiap dinas dan sub dinas pendidikan dengan data yang akurat dan terkini.
- f. Meningkatkan peran media untuk pendidikan sebagai alat bagi para pendidik, pemerintah, maupun LSM untuk memajukan perempuan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar.

4. Peningkatan Kekuatan Perempuan di Bidang Pendidikan

- a. Seberapa luas perempuan memegang posisi pembuat keputusan dalam struktur pendidikan?
- b. Norma dan praktek budaya seperti apa yang bertentangan dengan persamaan kesempatan bagi kaum perempuan dalam pendidikan?
- c. Apa penyebab terjadinya perbedaan gender dalam penerimaan untuk bersekolah?
- d. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh kebijakan dan aktivitas pendaftaran atau karena kurangnya fasilitas sekolah (atau kurangnya asrama) untuk anak-anak perempuan?
- e. Apakah biaya pendaftaran sekolah menjadi hambatan bagi kaum perempuan? Pada tingkat pendidikan yang mana?
- f. Apakah kendala-kendala tersebut berkaitan dengan keamanan anak-anak perempuan pada saat menempuh perjalanan jauh dari rumah menuju sekolah?
- g. Dalam rumah tangga, siapakah yang memutuskan pengeluaran untuk biaya pendidikan?
- h. Apakah mendidik anak perempuan dianggap sebagai investasi yang baik untuk keluarga?
- i. Apakah terdapat anggapan bahwa anak laki-laki kelak akan menanggung kehidupan orang tuanya, sehingga pendidikan untuk anak laki-laki



dianggap lebih penting daripada pendidikan untuk anak perempuan?

- j. Apakah terdapat anggapan bahwa pendidikan menyebabkan anak perempuan menjadi tidak patuh terhadap rencana yang ditetapkan orang tua bagi masa depan mereka?
- k. Apakah melalui konseling karier kaum perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam seluruh bentuk pelatihan?
- l. Apakah kaum perempuan terlibat dalam manajemen sekolah, dalam perkumpulan guru dan orang tua murid?
- m. Berapa besar angka perempuan yang memegang posisi sebagai pengambil keputusan dalam kementerian pendidikan?
- n. Berapa besar komitmen badan pelaksana untuk melibatkan perempuan pada berbagai tingkatan dalam proyek pendidikan?
- o. Apakah sistem pemantauan dan evaluasi secara eksplisit mengukur dampak program terhadap kaum perempuan?

5. Pertanyaan Penting dalam Pendidikan Tinggi

- a. Bagaimana distribusi mahasiswi pada berbagai bidang ilmu pada pendidikan tinggi?
- b. Kendala apa yang dihadapi perempuan ketika memasuki pendidikan tinggi?
- c. Apakah tersedia fasilitas yang layak (misalnya akomodasi asrama yang aman bagi perempuan, fasilitas belajar untuk perempuan apabila norma budaya memisahkan tempat belajar anak laki-laki dengan perempuan) dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk bersekolah?

C Hal-Hal yang Layak Dipikirkan oleh Kita Semua

- 1. Perguruan Tinggi secara khusus memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar wawasan peka gender kepada berbagai pihak, dimulai dari internal universitas (pihak rektorat, staf pengajar, dan para mahasiswa) melalui berbagai kegiatan baik pelatihan, ceramah, talk show atau bahkan mengintegrasikan isu gender ke dalam beberapa mata kuliah umum di tingkat persiapan bersama.

Mengembangkan strategi peningkatan prestasi perempuan melalui pemberian beasiswa khusus bagi perempuan berprestasi atau pemberian dana penelitian khusus bagi siapapun yang tertarik untuk meneliti topik-topik yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan di era globalisasi, maka penting untuk dipikirkan pendidikan di dalam keluarga berwawasan gender agar generasi mendatang lebih sadar dan responsif gender dibandingkan dengan generasi sekarang. Pendidikan Keluarga yang Berwawasan gender ini dapat diintegrasikan

ke dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata/ Kuliah Kerja Profesi mahasiswa dengan sistim pendampingan masyarakat dan melibatkan semua unsur kelembagaan di masyarakat diantaranya PKK dan Posyandu, Perkumpulan sosial-budaya, dll.

4. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan pada khususnya dan di bidang-bidang lainnya dengan pendekatan berbagai cara, misalnya:

a. ***Women help Women.***

Artinya bahwa:

- Kelembagaan dan organisasi perempuan harus meningkatkan kinerjanya untuk membantu sesama perempuan marjinal lainnya untuk meningkatkan SDMnya agar dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berbagai bidang pembangunan.
- Pada tahapan individual, perempuan harus diberikan kesadaran tentang adanya perasaan emphati, solidaritas, dan pentingnya perjuangan perempuan secara bersama-sama dalam memajukan seluruh perempuan Indonesia dalam berbagai bidang menuju kesejajaran dan kemitraan dengan laki-laki.

b. ***Men help Women.***

Artinya bahwa:

- Laki-laki dengan kesadarannya mempunyai kemampuan untuk beremphati, bekerjasama, dan toleran terhadap kaum perempuan. Dengan adanya kemitraan di segala bidang pembangunan yang dilandasi atas rasa membutuhkan dan saling melengkapi (baik secara profesional maupun psikologis) menjadikan kaum laki-laki untuk lebih dapat membuka diri dan bersedia untuk membagi wilayah “*Public Spheranya*” kepada kaum perempuan.
- Laki-laki bersedia untuk menolong kaum perempuan dalam meningkatkan kualitas SDMnya.

c. ***Families help Women.***

Artinya bahwa:

- Seluruh keluarga Indonesia meningkatkan peran dan fungsinya untuk mendidik dan melindungi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai dengan faktor biologisnya, namun memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan formalnya.

d. ***Government and Community Institution help Women.***

Artinya bahwa:

- Semua rencana strategi pemerintah dilandasi oleh adanya wawasan gender, sehingga kebijakan yang dilaksanakan sudah responsif gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

e. **Persyaratan Psiko-Sosial dan Mental yang Diperlukan oleh Seorang Pejabat Daerah Agar dapat “Responsif Gender”** dalam rangka meningkatkan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan (mengingat UU otonomi daerah yang sudah berjalan di seluruh Indonesia):

- Selalu melihat semua masalah, perencanaan, analisis, dan tujuan suatu kebijakan dari dimensi lensa gender (*gender lense*), yaitu:
 - Pejabat secara otomatis harus melihat setiap aspek kebijakan yang berada dalam wilayah kerjanya (tupoksi) apakah ada kesenjangan (*disparitas*) gender.
 - Apabila ada kesenjangan gender, maka pejabat harus memutuskan bahwa setiap bentuk kesenjangan harus diakhiri. Disparitas tidak akan diterima lagi secara pasif.
- Selalu merubah *mind set* yang masih buta gender menjadi responsif gender:
 - *Mind-set* pejabat yang masih buta gender adalah kondisi / keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender (bahwa ada perbedaan dan persamaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan).
 - *Mind-set* pejabat yang masih bias gender adalah keadaan seseorang yang memihak pada salah satu jenis kelamin (biasanya jenis kelamin yang sama dengan dirinya) dan berlaku tidak adil terhadap kepentingan jenis kelamin lainnya.
 - *Mind-set* pejabat yang mulai netral gender adalah keadaan seseorang yang sudah tidak memihak pada salah satu jenis kelamin apapun, dan berusaha adil dalam memandang kepentingan individu.
 - *Mind-set* pejabat yang sudah sensitif gender adalah kondisi kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
 - *Mind-set* pejabat yang sudah responsif gender adalah keadaan seseorang yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan dan sudah bertindak sesuatu dengan melaksanakan kebijakan di wilayah kerjanya yang responsif gender.
- Mempunyai kepribadian yang bijaksana dan adil tanpa ada bias terhadap apapun, termasuk bias terhadap jenis kelamin.
 - Menghilangkan sifat bias gender, dan berburuk sangka (*prejudice*) terhadap seseorang, baik karena perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

jenis kelamin, maupun karena perbedaan sosial-ekonomi dan budayanya.

- Merasa berdosa apabila tidak dapat berlaku adil pada salah satu jenis kelamin.
 - Merasa berdosa apabila menjadi pejabat daerah namun tidak berbuat apa-apa yang berkaitan dengan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender.
 - Merasa berdosa apabila menjadi pejabat daerah namun tidak melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pegawai perempuan dalam rangka memotivasi dan memberikan kesempatan dalam meningkatkan ketrampilan dan karir serta posisi jabatan.
- Memelihara sifat yang responsif gender, yaitu:
- Menghargai Keragaman Pluralistis, yaitu menerima keragaman etnis budaya, agama dan adat istiadat (pluralistis).
 - Memperjuangkan gender melalui pendekatan yang harmonis, dan bukan melalui pendekatan dikotomis.
 - Memperjuangkan gender melalui proses mekanisme sosialisasi dan advokasi secara bertahap dan berkesinambungan.
 - Memperjuangkan gender dengan sekaligus menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, bukan melalui pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan sehingga ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan yang tidak diterima oleh lapisan masyarakat.
- Bersedia untuk bekerjasama dengan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dengan sikap saling toleransi dan saling menghormati dengan tulus:
- Seorang pejabat daerah harus rela dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk diperintah oleh atasannya seorang perempuan (seorang laki-laki harus rela menjadi bawahan seorang perempuan).
 - Seorang pejabat daerah harus berlaku adil dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dalam mempertimbangkan untuk mempromosikan bawahan laki-laki dan perempuan.
 - Seorang pejabat harus bersedia menciptakan suasana yang cair dengan komunikasi yang efektif antara laki-laki dan perempuan. Pejabat harus menyadari bahwa semakin sering ada dialog antara laki-laki dan perempuan untuk diundang ke ruang pimpinan, maka dialog akan semakin sering terjadi. Hanya melalui komunikasi, laki-laki dan perempuan mengenal berbagai gagasan, sumbangan dan keterampilan yang dimiliki jenis kelamin lain. Hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dengan “berbagi ruang yang sama”, perempuan dan laki-laki saling menghargai secara setara. Itulah esensi kesetaraan gender.

f. Persyaratan Kompetensi Seorang Pejabat Daerah yang Responsif Gender

- Pejabat harus mempunyai pengetahuan tentang konsep gender, yaitu:
 - Gender bisa menjadi pemikiran semua pihak.
 - Mampu memasukkan permasalahan gender dalam program pembangunan.
 - Mampu mengintegrasikan permasalahan gender dalam agenda pembangunan.
 - Mampu melakukan suatu usaha untuk memasukkan kerangka gender ke dalam disain, pelaksanaan rencana dan program sektoral.
 - Mampu memadukan isu gender ke dalam arus utama (*mainstream*), dan sekaligus mengubah arus utama agar lebih tanggap dan kondusif terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Pejabat harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis kesenjangan (*disparitas*) gender:
 - Kerangka berpikir harus secara otomatis berlandaskan analisis kesenjangan gender.
 - Kesenjangan gender harus dianalisis dan dibuktikan secara obyektif dan disajikan dalam bentuk bukti kuantitatif dan kualitatif. Data gender inilah digunakan sebagai bukti untuk membuat para pengambil kebijakan lainnya bersedia untuk berubah.
- Pejabat harus mampu mempunyai komitmen dalam memperjuangkan Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan ciri-ciri:
 - Mempunyai perangkat/ struktur organisasi yang menampung aspirasi gender, yaitu lembaga (baik badan, dinas, maupun kantor) yang membidangi pemberdayaan perempuan di daerahnya minimal Eselon III (sesuai dengan Surat Edaran Mendagri dan Kementerian Pemberdayaan perempuan).
 - Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau *Gender Focal Point* yang sifatnya membantu terselenggaranya kebijakan yang responsif gender, mulai dari tingkatan SKPD (Tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sampai dengan tingkatan regional, dan nasional). Seorang pejabat harus

mengusahakan agar Pokja ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Walikota.

- Melakukan sosialisasi dan advokasi secara rutin dan berkesinambungan baik dalam internal Pokja maupun dengan pihak lain yang terkait dengan penanggulangan permasalahan gender.
- Mempunyai kemampuan mengintegrasikan konsep gender ke dalam kebijakan di wilayah kerjanya, yaitu:
 - Dalam rangka mewujudkan rasa keadilan gender, maka mekanismenya melalui perubahan perundang-undangan yang mengatur pemerintah lokal dalam merespon isu gender yang merugikan baik perempuan maupun laki-laki.
 - Semua ini dalam rangka menciptakan struktur yang terbuka dan lingkungan resmi bagi laki-laki dan perempuan untuk memainkan peran yang sama dan mempunyai hak yang sama. Namun demikian, mekanisme keadilan tidak dengan sendirinya langsung dapat menuju kesetaraan gender. Mekanisme itu hanya merupakan langkah pertama dalam proses yang diperlukan untuk menengarai hambatan yang sebenarnya.
 - Realitas sosial, budaya, ekonomis dan/atau politis perlu diubah. Jika masalah kesenjangan gender terdapat di dalam suatu organisasi/struktur, maka pejabat yang berwenang harus secara tuntas menganalisis dengan teknik analisis yang peka gender. Analisis yang benar akan mengetahui “siapa” yang perlu dilibatkan sebagai sekutu untuk perubahan. Analisis gender juga akan menemukan berbagai mekanisme pelibatan untuk membawa serta para stakeholder tersebut itu. Mekanisme pelibatan itu sering mencakup: pementoran, penjalinan jejaring, pemekaan, pengenalan, kerja sama, penerbitan dan pembelaan.
 - Keberhasilan dalam melibatkan cukup banyak orang yang tepat dan berpengaruh akan memicu suatu perubahan yang gradual dan kontinyu menuju kesetaraan dan kadilan gender.

Hal-hal tersebut di atas sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi “emitraan gender” di segala bidang pada semua lapisan masyarakat. Memang terasa berat dan kompleks untuk mewujudkan semua ini, namun kalau kita semua sepakat dalam meyakini bahwa “Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan” merupakan suatu yang layak diperjuangkan dalam mewujudkan kesejahteraan Bangsa Indonesia, maka kita mulai melangkah pasti dengan meningkatkan “Kualitas Prestasi Perempuan di Bidang Pendidikan” secara berkesinambungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

VI. PENUTUP

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas) disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu hal yang paling prioritas (*crucial*) harus dilakukan adalah kesepakatan dan komitmen bersama antar stakeholders (pihak legislatif & yudikatif, pihak eksekutif, para pendidik/ dosen, para pelajar/ mahasiswa, pihak keluarga, kelompok masyarakat) dalam mengatasi akar permasalahan kesenjangan gender di bidang pendidikan.

Dalam satu dekade terakhir, prestasi perempuan memang sudah mengalami kemajuan dalam dekade terakhir ini, bahkan dalam skala mikro pada tingkatan jenjang sekolah dasar dan menengah, bahkan terkadang mengungguli prestasi laki-laki. Namun demikian secara makro dan jangka panjang, masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu harus ada perubahan cara pandang (*mind set*) terhadap persepsi tentang konsep gender pada semua komponen bangsa. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda yang akan datang baik laki-laki maupun perempuan dapat mengisi era globalisasi dengan lebih baik di masa depan.

Sebagai penutup dari bab ini adalah perlunya penerapan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi perempuan agar dapat meningkatkan prestasinya, khususnya di bidang pendidikan. Jadi peran dan fungsi institusi-institusi pemerintah harus dioptimalkan agar pembangunan dapat terwujud dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Mudah-mudahan “Temu Nasional” ini bukan hanya sekedar pertemuan diskusi belaka, namun kemudian menjadi pertemuan yang mampu menyusun langkah-langkah konkret di daerah, dan kemudian melaksanakan kerja nyata yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Sungguh sayang, kalau pertemuan ini hanya pertemuan “*NATO (No Action Talk Only)*” belaka.....



DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2004. Pesan Standar: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. 2005. Profil Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005. Pemerintah Propinsi Jawa Barat: Dinas Pendidikan.
3. **© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)** Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2005. SUSEDA (Survei Sosial Ekonomi Daerah).
4. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2005. Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2005. Panduan dan Bunga Rampai: Panduan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-BKKBN-UNFPA.
6. Moser, C and Levy, C. 1993. Training Materials Developed for Training in Gender Planning for Development. In Caroline O.N. Moser Gender and Development: Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. Routledge. London.
7. Overholt, Cloud and Austin. 1985. Gender Roles in Development Projects. Kumarian Press, Connecticut.
8. Puspitawati, H. 2006. Pengaruh Faktor keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah Terhadap kenakalan Pelajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor. Disertasi Doktor yang tidak Dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
9. Rosalin, LN. 2007. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIKDASMEN YANG RESPONSIF GENDER. BAPPENAS. Disampaikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender, Diselenggarakan oleh Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Safari Garden, Bogor, 23 Mei 2007
10. UNESCO.1998. Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators.
11. UNESCO. 2005. Education For All: The Quality Imperative. EFA Global Monitoring Report.
12. USAID. 1998. Promoting Education for Girls in Nepal.
13. Mugniesyah, S., Sriwahyuni, E., Mahfuds, & Puspitawati, H. 2003. Profil Gender di Perguruan Tinggi Jawa Barat. Laporan Kerjasama: Pusat Studi Wanita-LPPM-IPB dan Departemen Pendidikan Nasional-RI.
14. KPP. 2003. Gender Checklist dalam Pembangunan. Presentase.
15. Puspitawati. 2006. Penguasaan Berwawasan Gender. Presentase Tim pakar Gender Departemen Pendidikan Nasional-RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	2
II. MENDIDIK PEREMPUAN SAMA DENGAN MENDIDIK BANGSA.....	4
III. KONDISI PRESTASI PENDIDIKAN PEREMPUAN DI INDONESIA.....	8
IV. GENDER CHECKLIST DI BIDANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA MELAYU BANGSA MELAYU SONGSONG ERA GLOBALISASI.....	9
A. Checklist Kesetaraan Gender Di Tingkat Keluarga dan Masyarakat.....	9
B. Checklist Kebijakan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan	11
C. Hal-Hal yang Layak Dipikirkan oleh Kita Semua.....	13
V. PENUTUP.....	19
VI. DAFTAR PUSTAKA.....	20

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.